



## Pertanyakan Soal Anies Minta Bantuan

### ► PDIP Minta Jangan hanya Bikin Narasi

#### Palmerah, Warta Kota

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kerineth tak habis pikir terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan 8 program transformasi Jakarta.

Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.

Pria yang kerap disapa Kent itu mempertanyakan pernyataan orang nomor satu di DKI Jakarta itu yang baru saat ini meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan program-program unggulannya.

"Kenapa Pak Anies baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? kemana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," ketus Kent dalam keterangan persnya, Minggu (17/4).

Menurut Kent, sejak dari awal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Pusat selalu mencoba menjajin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.

"Sejak Pak Anies memimpin Jakarta, setahu saya dari awal pemerintah pusat selalu ingin berkolaborasi tapi responnya, selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat, selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

#### Anggaran Tak Terserap

Kent pun menilai, selama memimpin Jakarta Anies tidak pernah mengeksekusi program-program yang menjadi unggulannya tetapi malah mengerjakan program yang nyeleneh.

Selama ini, pemerintah daerah Jakarta tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung.

Alhasil program normalisasi mandek. Alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap.

Padahal, sambung Kent, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun pada 2020 lalu.

Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

"Anggaran PEN saja dia

(Anies-red) enggak mau di eksekusi dengan maksimal, kerjanya hanya buat narasi saja. Kalau hanya buat narasi semua orang bisa, sama saja seperti mengarang bebas tapi tidak bisa dieksekusi dan tidak terealisasi," katanya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI diketahui lambat dalam menyerap anggaran PEN, mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks.

"Kan aneh itu, seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus di susun program yang realistis, bukan mengusulkan program program yang nyeleneh yang tidak realistis, akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," tambahnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan 8 program transformasi Jakarta.

Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.

Dia juga mendorong pelaksanaan pembangunan dan peningkatan tanggul laut, *breakwater* dan bangunan pengaman pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Jakarta. Selain itu, masterplan hulu-hilir juga dimatangkan guna pengendalian banjir dapat terlaksana. (TribunJakarta)